

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK/100/PUU-X/2012
TERHADAP HAK BURUH
(Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Oleh:
Aiyub Anshori
NIM 10220024**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK/100/PUU-X/2012
TERHADAP HAK BURUH
(Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Oleh:
Aiyub Anshori
NIM 10220024**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK No 100/PUU-X/2012 TERHADAP
HAK BURUH
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Hukum Islam)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2014

Penulis,

Aiyub Anshori
NIM 10220024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aiyub Anshori, NIM 10220024,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK No 100/PUU-X/2012 TERHADAP
HAK BURUH
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Hukum Islam)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2014

Mengetahui
a.n. Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

a.n. Dosen Pembimbing,

Dr. H.Abbas Arfan, Lc, M.H.
19721212200641004

Dr. H.Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP 19721212200641004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Aiyub Anshori, NIM 10220024, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK No 100/PUU-X/2012 TERHADAP
HAK BURUH
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Hukum Islam)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (sangat baik)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 1965090419990320001 Ketua
2. Burhanuddin Susanto, S.H.I. M.Hum. (_____)
NIP 197801302009121002 Sekertaris
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum. (_____)
NIP 196807101999031002 Penguji Utama

Malang, 6 Oktober 2014

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

(berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.)¹

¹ *Shahih Imam Ibnu Majah, No 2434*

PRAKATA

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan nikmat, iman dan islam. Sholawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tercinta ini dengan judul skripsi Implikasi Yuridis Putusan Mk No 100/Puu-X/2012 Terhadap Hak Buruh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam).Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi suatu karya ilmiah yang bisa disumbangkan kepada semua pihak yang ingin mengkaji tentang Pembayaran upah dan tuntutan hak pekerja/buruh. Skripsi ini diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta dalam kesempatan ini penulis secara khusus ingin menghaturkan rasa cinta yang tulus dan hormat kepada kedua orangtua dan kepada saudara-saudara yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa dan bimbingan serta motivasi yang besar dan kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. , selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih dan rasa hormat yang dalam penulis haturkan atas waktu, energi, bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. H. Khoirul Anam, Lc, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu menjadi inspirasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt selalu menjaga mereka dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam konsistensi pengajaran.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman perantauan Abdiel Malik, Van Dunk Nani Saiful, Fahrurozi, Kang Mudin, Athoillah, Faizuddin, Moch Said, IBM Hidayat, Muhammad Riyan Perkasa Utomo, Irene Dwi, Yulia Kusuma dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan semangat, menghibur, memotivasi mendukung penulis disaat segala kondisi suka maupun duka dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman HBS seperjuangan, terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini dan telah memberikan kenangan indah pada masa-masa kuliah.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 11 September 2014

Penulis,

Aiyub Anshori
NIM 10220024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.²

B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	sh	ي	=	Y

² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), h. 73-76.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ”ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal(u)panjang = û misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

D. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila terletak di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ` Allâh kâna wa mâlam yasyâ` lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Pengupahan	24
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012.....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	32
2. Subtansi Putusan MK NO 100/PUU-X/2012.....	34
C. Upah Menurut Hukum Islam	36
1. Pengertian Ijarah	36
2. Rukun dan Syarat Ijarah.....	40
3. Pembayaran Upah dalam Islam.....	44
BAB III Implikasi Yuridis Putusan MK No 100/Puu-X/2012 Terhadap Hak Buruh (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam)	46

A. Implikasi yuridis Putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh	46
B. Pembayaran Upah Pekerja Pasca Putusan MK Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan	53
C. Pembayaran Upah Pekerja Pasca Putusan MK No 100/PUU-X/2012 Menurut Hukum islam	55
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Bukti Konsultasi	
Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu	21
--	----

ABSTRAK

Aiyub Anshori, 10220024, **Implikasi Yuridis Putusan MK/100/PUU-X/2012 Terhadap Hak Buruh (Tinjauan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Muhammad Nur Yasin, M.Ag

Kata Kunci : Implikasi, Hak Buruh, Putusan MK.

Upah merupakan komponen penting yang digunakan dalam dunia ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja para pekerja/buruh. Pembayaran upah seharusnya dibayarkan secara penuh bagi pelaku usaha kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan semenjak hubungan kerja itu timbul. Putusan MK No 100/PUU-X/2012 menghapus tentang ketentuan tuntutan segala pembayaran akan habis apabila telah melewati jangka waktu dua tahun.

Penelitian terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implikasi yuridis putusan MK No 100/PUU-X/2012 terhadap hak buruh? b) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang pembayaran upah pekerja pasca putusan MK No 100/PUU-X/2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan pembayaran upah setelah dikeluarkannya putusan MK No 100/PUU-X/2012 tidak memiliki batas jangka waktu yang ditentukan sehingga pekerja/buruh dapat menuntut hak-haknya, dan pengusaha diharuskan untuk membayarkan upah pada waktu yang telah disepakati. Dalam pandangan hukum Islam nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pembayaran upah pekerja harus diutamakan dan dilakukan dengan membayarkan upah pada waktu yang disepakati. Dalam pandangan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pembayaran upah pekerja pasca putusan MK/PUU-X/2012 hanya berlaku ketentuan dalam pasal 91, bahwa pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

Aiyub Anshori, 10220024, **Implications of the Decision Juridical MK / 100 / PUU-X / 2012 of the Rights of Workers (Consideration of Law Number 13 2003 about Islamic Labor Act)**. Thesis, Islamic Business Law Department, Islamic Law Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Dr. Muhammad Nur Yasin, M.Ag

Keywords: Implication, Right of Workers, constitutional adjudication.

Wages was an important component of laborers world in the effort to increase productivity and quality of the labors. Businessman had to pay the labourage fully for the laborers on the date of the contract agreed. Constituent court decree No 100/PUU-X/2012 delete an applicable law of wage demanding which passed the period of time after two years contract agreed. There was a conflict of human right between businessman and the laborers in the laborers world after the decree.

This research contained some statement of the problems, such as: 1) How juridical implications of the Constitutional Court No. 100 / PUU-X / 2012 on labor rights? b) How was the Islamic law and law No 13 2003 about labourage fee-paid after constituent court decree No 100/PUU-X/2012? This research used normative method and categorized as a library research. Researcher used statue approach, case approach and conceptual approach. The law material was primary law material No 13 2003 about laborers and Islamic law. Researcher considered that this study was analyzed by descriptive qualitative method.

This research showed that labourage demand after constituent court decree No 100/PUU-X/2012 had no expired date of the fee-paid that laborers could get their rights and businessman had to pay the wages on the date of contract agreed. In the Islamic perspective of human values and the justice of labourage fee-paid to be considered and had to paid on the date of contract agreed. On the view of law No 13 2003 about labourage demand law after constituent court decree MK/PUU-X/2012, so, article No 91 was merely used that the setting of labourage determined after an agreement between businessman and the laborers or labor union cannot lower than wage rule determined on the law used.

ملخص البحث

أيوب أنصاري, 10220024, الآثار المترتبة على قرار القضاء -MK / 100 / PUU
2012 / X حقوق العمال (نظرية قانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن العمل وحكم
الإسلام), بحث جامعي بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولان مالك
إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور محمد نور ياس الماجستير

الكلمة الرئيسية الأثار, مطالب دفع الأجرة, قرار المحكمة.

الأجور عنصر مهم الذي يستخدم لتحسين الإنتاجية العمال و جودتهم في عالم التوظيف. و
ينبغي للشركات بدفع الأجرة كاملة منذ العقد. و قد زال قرار المحكمة رقم 100/PUU-
2012/X عن كل مطالب الدفع ماالذي انتهى بعد سنتين.

و في هذا البحث هناك المشكلة وهي كيف القضاء الآثار المترتبة على المحكمة الدستورية رقم 100
/ 2012 / X -PUU على حقوق العمال؟ و كيف نظرية قانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن
العمل وحكم الإسلام؟ يستخدم هذاالبحث بحثا معياريا ويقال بالبحث المكتبية. و أما منهج
البحث يستخدم بمنهج التشريع و منهج القضية و منهج المفهوم .

و تشير نتيجة هذاالبحث إلي أن مطالب على دفع الأجور بعد صدور قرار المحكمة
رقم 100/PUU-X/2012 لم يكن فيه الحد من المقررة الزمنية المحددة بحيث يمكن للعمال أن
يطالبوا بحقوقهم، و يجب لصاحب العمل بدفع الأجور في الوقت المتفق عليه. و في نظرية الشريعة
الإسلامية تفضل بنتائج العدالة والإنسانية في دفع الأجور و يجب أن يتم بدفعها في الوقت المتفق
عليه. و في نظرية القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن التوظيف، دفع الأجور بعد قرار المحكمة رقم
100/PUU-X/2012 لا ينطبق إلا لأحكام المادة 91 . أن ترتيب الأجر بالاتفاق بين
أصحاب العمل والعمال أو النقابات العمالية، لا ينبغي أن يكون أقل من أحكام أجور محددة من
التشريعات المعمول بها.